

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BURUH MIGRAN

Rili Windiasih dan Toto Sugito
FISIP Universitas Jenderal Soedirman
rili.1997unsoed@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian memiliki tujuan untuk membuat model Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Desa (FPPD) sebagai aktualisasi pembangunan partisipatif. Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai metoda riset yang melibatkan peran dan potensi masyarakat secara partisipatif untuk mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta menentukan kebutuhan yang harus dilaksanakan masyarakat sendiri. Pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian dengan analisis interaktif melalui reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model FPPD merupakan realisasi komunikasi partisipatif yang berperan penting dalam pembangunan di desa untuk memberikan kesempatan lebih terbuka bagi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: *desa, komunikasi, partisipatif, pemberdayaan, perempuan*

ABSTRACT

The research aims to create the model of communication forum for village women empowerment as the actualization of participative development (FPPD). The research used Participatory Rural Appraisal (PRA) research method that involves the role and potential of the community in a participatory to identify and find solutions to problems, and determine the needs that must be implemented by the community itself. Data were collected through Focus Group Discussion (FGD), interviews, observation, and documentation. Analysis of research used interactive analysis through reduction and presentation of data and conclusion. The research location in Sidaurip Village and Karangtawang Village, Cilacap Regency. The results showed that FPPD model have realization of participatory communication that important role in rural development to provide more opportunities for women in planning, implementation, and evaluation of empowerment programs and improving welfare.

Keywords: *communication, empowerment, participatory, village, women*

PENDAHULUAN

Perwujudan dari perjuangan reformasi, demokratisasi dan otonomi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sampai ke tingkat paling dekat dengan rakyat pada level desa yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43. Pada Pasal 1 (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pada ayat (3) pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berlakukanya UU desa tersebut sebagai otonomi bagi desa dan pembangunan yang bersifat partisipatif yang sudah intens menjadi konsep dan kajian akademis. Sebagaimana menurut Adi(2013) bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidakdilakukan pembangunan masyarakat desa karena disadari masih cukup banyak desayang belum dikembangkan secara optimal. Syahyuti (2006) konsep pembangunan partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan. Rangkuti (2011) bahwa paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran dimana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) yang dikenal dengan pembangunan manusia (*people centered development*) pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource based development*) dan pembangunan kelembagaan (*intitutional development*).

Berdasarkan semangat, dukungan dan keseriusan membangun desa tersebut, diharapkan desa bukan hanya kampung halaman yang dicintai dan dirindukan oleh salah satunya masyarakat desa yang menjadi buruh migran khususnya kaum perempuan. Seharusnya desa bisa menjadi wilayah yang ramah, nyaman, menyenangkan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tidak ditinggalkan dan diabaikan pembangunanya. Paradigma terbaru muncul pada tahun 2013-2014 khususnya di Provinsi Jawa Tengah yaitu kampanye pembangunan dari Gubernur Jateng tentang konsep "Bali Deso, Bangun Deso" artinya kembali ke desa dan membangun desa. kemudian pada tahun 2015 muncul lagi istilah yang merubah paradigma "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun", artinya pelaku pembangunan tidak lagi dominan dari orang di luar desa, tetapi masyarakat desa sendiri yang memiliki keinginan, inisiatif dan bekerja untuk desanya untuk memajukan serta mensejahterakan desanya. Semangat dan Konsep Bali Deso, Bangun Deso" dan "Desa Membangun" merupakan aplikasi dari konsep pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang berpusat pada rakyat dan pemberdayaan. Hal ini menjadi semangat dari peneliti untuk mewujudkan riset tentang pemberdayaan perempuan dalam pengembangan

kewirausahaan desa khususnya bagi masyarakat desa yang menjadi pusat dan terbesar jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap.

Artinya jika pengembangan pemberdayaan kewirausahaan di masyarakat dapat diwujudkan, maka masyarakat desa tidak lagi menjadi buruh migran khususnya kaum perempuan di desa yang masih menilai buruh migran menjadi orientasi utama dalam mencari kerja dan kesejahteraan. Masyarakat desa yang banyak calon, mantan dan menjadi buruh migran akan ada alternatif pekerjaan dan penghidupan dengan bisa tinggal betah di desanya jika ada pekerjaan dan sumber penghasilan di desanya.

Semangat dan konsep "Bali Deso Bangun Deso dan Desa Membangun" akan tetap menjadi slogan dan motto kampanye politik dan pembangunan otonomi Desa jika tidak ada suatu kajian dan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dalam program pemberdayaan desa yang membuat masyarakat desa khususnya perempuan mau tinggal untuk bekerja dan memiliki jaminan ekonomi di desanya, serta tidak lagi menjadi buruh migran sebagai profesi yang paling utama dan menjanjikan kesejahteraan.

Realitas yang masih terjadi bahwa menjadi buruh migran selalu disebut sebagai "pahlawan devisa", karena dapat mendatangkan pendapatan bagi negara dan seakan profesi yang selalu menjadi orientasi masyarakat desa dengan harapan besar dapat merubah nasib yang lebih baik dan lebih cepat mensejahterakan diri serta keluarganya. Namun pada realitas lainnya menunjukkan tidak sedikit problematika yang muncul ke publik, mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja dan setelah pulang bekerja ke tempat asal di kampung halaman. Kasus buruh migran khususnya perempuan yang dimaksud seperti: status kerja yang tidak legal (ilegal), tuduhan dan hukuman berat atas pencurian serta pembunuhan, mendapat perlakuan kekerasan fisik, mental, termasuk seksual, terutama yang dialami oleh buruh migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sampai Januari 2015/2016 tercatat beberapa masalah seperti kasus TKI ingin dipulangkan ke Indonesia 3.205,. Kasus gaji TKI tidak dibayar majikan 3.189. TKI putus hubungan komunikasi 2.676. Pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja (PK) 1.633. TKI meninggal dunia di negara tujuan 1.574. TKI mengalami tindak kekerasan dari majikan 718 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak 458. TKI gagal berangkat 401. Kasus TKI dalam tahanan/proses tahanan sebanyak 307. TKI tidak berdokumen 258. Kasus penahanan Paspor atau dokumen lainnya sebanyak 236. Kasus

TKI lari dari majikan 212 . Pelecehan seksual pada TKI sebanyak 201 (Sumber <http://www.bnp2tki.go.id/>. 15 Januari 2016).

Selama 2013-2014 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI bermasalah, data dari Migrant CARE ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri (sumber: <http://www.dpr.go.id>). Begitupun menurut Wulan (2010) bahwa Buruh Migran Perempuan (BMP) sering mengalami ketidakadilan mulai dari sebelum berangkat, di tempat kerja dan sampai kepulangannya kembali ke daerah asal. Padahal menjadi BMP sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga (mencari nafkah) dan sebenarnya memberikan kontribusi bagi devisa negara dan remiten bagi daerahnya.

Namun menjadi buruh migran bagi masyarakat tertentu menjadi tawaran profesi yang menjanjikan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, sekalipun sudah banyak permasalahan. Kemudian tidak bisa dipungkiri buruh migran juga secara signifikan menghasilkan sumber pendapatan bagi devisa negara dan pendapatan asli daerah, sehingga membantu perkembangan pembangunan di daerah serta bagi keluarganya Berdasarkan data remitan di Kabupaten Cilacap sebagai daerah buruh migran terbanyak di Jawa Tengah yaitu statistik kiriman uang (remitansi) buruh migran asal Cilacap, Jawa Tengah terus naik dari tahun ke tahun.

Hal ini bisa menjadi bukti bahwa warga Cilacap telah banyak yang menjadi buruh migran. Pada tahun 2008, tercatat remitansi berjumlah Rp 324 milyar per tahun, tahun 20015/2016 menjadi Rp 370 milyar, memasuki tahun 2016 jumlahnya bertambah menjadi Rp 570 milyar dan puncaknya di tahun 2011 besaran remitansi mencapai Rp 700 milyar lebih, telah menyentuh angka separuh lebih dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap. Maka melihat remitansi tersebut seharusnya seluruh *stakeholder* baik dari kalangan tokoh masyarakat hingga pemerintah, menganggap buruh migran sebagai sektor penting yang harus diperhatikan (sumber : www.buruhmigran.or.id).

Maka sudah seharusnya buruh migran khususnya perempuan menjadi perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, wakil rakyat, pihak swasta, dan lembaga-lembaga di *civil society* mulai tingkat pusat sampai tingkat lokal (desa) termasuk akademisi atau perguruan tinggi. Menurut hasil penelitian Subianto (2006), diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam menumbuhkan *entrepreneurship* agar pemanfaatan pendapatan dari buruh migran yang dikirimkan ke desa selama pelaku mobilitas

tidak berada di desa (remitan) dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif semata.

Meskipun telah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran perempuan, namun dalam pelaksanaannya di daerah, belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. maka memerlukan peran aktif pemerintah khususnya untuk membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal (Sutaat *et al.* 2011). Perihal perhatian pemerintah terhadap buruh migran, di Kabupaten Cilacap menurut Libanun Muzayyin sebagai Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Cilacap, dalam Workshop Jaringan Kepala Desa yang membahas komitmen pemerintah desa dalam memberikan buruh migran dan keluarganya di daerah asal, sehingga Kabupaten Cilacap dengan jumlah buruh migran terbanyak di Jawa Tengah dan salah satu yang terbesar di Indonesia, semestinya memang memiliki Perda khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan buruh migran (sumber : <http://polhukam.rmol.co/read>).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik dan peduli untuk berperanserta menghasilkan solusi kongkrit bagi masalah buruh migran perempuan khususnya yaitu dengan melakukan penelitian. Hasil penelitian bisa memberikan kontribusi nyata untuk memberikan rekomendasi dan penegasan ilmiah yaitu meningkatkan kewirausahaan melalui pemberdayaan bagi mantan dan calon butuh migran perempuan di desa serta dapat dijadikan rekomendasi penting bagi perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan wakil rakyat, minimal untuk tingkat pemerintah lokal yaitu di lokasi desa sebagai tempat buruh migran. Kemudian dapat juga membawa manfaat untuk kajian lanjutan, program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat bagi calon atau mantan buruh migran, serta untuk keluarganya maupun masyarakat sekitarnya di daerah asal.

METODE PENELITIAN

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang secara harfiah artinya pengkajian keadaan desa secara partisipatif, yang menghargai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan bagi masyarakat (Syahyuti 2006). Menurut Chambers (dalam Mikkelsen 2011) *Participatory Rural Appraisal* (PRA) memungkinkan orang-orang desa menganalisis situasi,

secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri sehingga PRA adalah penilai pedesaan yang partisipatoris.

Prosedur pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dengan mempergunakan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Bungin 2008). Prosedur pelaksanaannya yaitu observasi dan wawancara dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu: (1) mulai dari studi pendahuluan dalam mengamati, mengunpulkan informasi dan data, menganalisis suatu daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian, pembukaan akses atau pendekatan, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian dan desain penelitian. (2) Ketika proses penelitian di lapangan baik sebelum, dalam proses dan setelah pelaksanaan FGD; (3) Setelah proses penelitian untuk verifikasi data dan triangulasi hasil penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih dan ditentukan yaitu di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, dengan pertimbangan sebagai daerah pengirim terbesar jumlah buruh migran di Jawa Tengah yaitu di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun dan Desa Danasri Kecamatan Nusawungu. Penentuan subjek penelitian dengan menggunakan purposif sampling yang dipilih atas pertimbangan peneliti bahwa informan atau subjek penelitian dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian. Setiap desa ditentukan sekitar 15 orang dari para calon dan mantan buruh migran, sehingga jumlah keseluruhan sekitar 30 informan dari dua desa (dua lokasi) sebagai kelompok pekerja (*community worker*) yang akan menjadi pionir bagi pelaku pembangunan dan agen perubahan di masyarakat desa. Analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di desa khususnya kaum perempuan di Kabupaten Cilacap memiliki persepsi dan tradisi bahwa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah profesi yang paling menjanjikan dan mensejahterakan. Walaupun banyak sekali permasalahan menjadi TKW mulai proses keberangkatan, proses bekerja dan kepulangan, tetapi menjadi TKW masih dinilai paling menjanjikan, cepat mendapatkan banyak penghasilan. Namun dampak jangka panjangnya pembangunan di desa tidak dapat berkembang sesuai potensi sumber daya baik alam seperti pertanian dan peternakan serta sumber daya manusianya, sehingga desa hanya menjadi tempat mudik ketika musim libur panjang dan budaya mudik lebaran serta sebagai

tempat kelahiran dan dibesarkan. Maka penting untuk melakukan kajian dan penelitian tentang komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan perempuan khususnya di lokasi penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi mantan dan calon TKW. Penelitian dilakukan pada tahun 2015-2017, pada tahun 2015-2016 proses penelitian diawali dengan melakukan kajian pustaka dari berbagai hasil riset, jurnal dan realitas faktual di media massa, kemudian melakukan diskusi untuk hasil kajian pustaka untuk merancang rencana penelitian baik tujuan, sasaran, metode dan waktu pelaksanaan. Tahapan berikutnya melakukan pembukaan akses penelitian, mengajukan perijinan dan pendekatan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, aktivis dan tokoh penggerak wanita. Pada awalnya peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin kepada pemerintah desa dengan sifat kehati-hatian, sensitifitas dan ketertutupan pada pihak luar sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan (1) Sedang menghadapi masalah penambangan pasir dengan adanya konflik kebijakan, penggunaan dan alokasi anggaran. (2) Penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melibatkan oknum lokal (calo) yang bermain dan menguasai. (3) Kasus penipuan investasi saham yang dilakukan orang luar sehingga banyak masyarakat desa mengalami kerugian.

Tanggapan peneliti terhadap kasus tersebut dengan mengkomunikasikan kepada pemerintah desa, bahwa tujuannya bukan untuk meneliti atau mengungkap hal tersebut, tetapi berencana membuat dan melaksanakan program pemberdayaan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak mendapat kecurigaan dan penolakan dari pemerintah desa dan informan. Dengan demikian target dan hasil penelitian tahun 2015-2016 yaitu identifikasi masalah, analisis potensi masyarakat desa dan tim peneliti dapat diijinkan dan diterima untuk melakukan penelitian seperti proses wawancara, observasi langsung dan analisis dokumentasi. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan komunikasi pembangunan atau pemberdayaan secara partisipatif, menurut Mefalopoulos yang dikutip Dasgupta (2009) komunikasi berperan penting dalam pembangunan yang menghasilkan partisipasi, dialog, dan diseminasi pengetahuan penting (*generating participation, dialogue, and dissemination of vital knowledge*). Komunikasi dapat membantu, mendukung dan mengadopsi model pembangunan secara dialogis dan mengkolaborasi semua stakeholder dengan berbagi pengetahuan sebagai bentuk pendidikan masyarakat. Praktek komunikasi partisipatif dalam pembangunan, menurut Steeves (dalam Porras & Steeves, 2009) diindikasikan dengan tatap muka dialogis secara egaliter, yang melibatkan refleksi, tindakan, dan tanpa perbedaan hirarki peserta dialog. Muchlis (2009) menyatakan pentingnya komunikasi partisipatif dalam

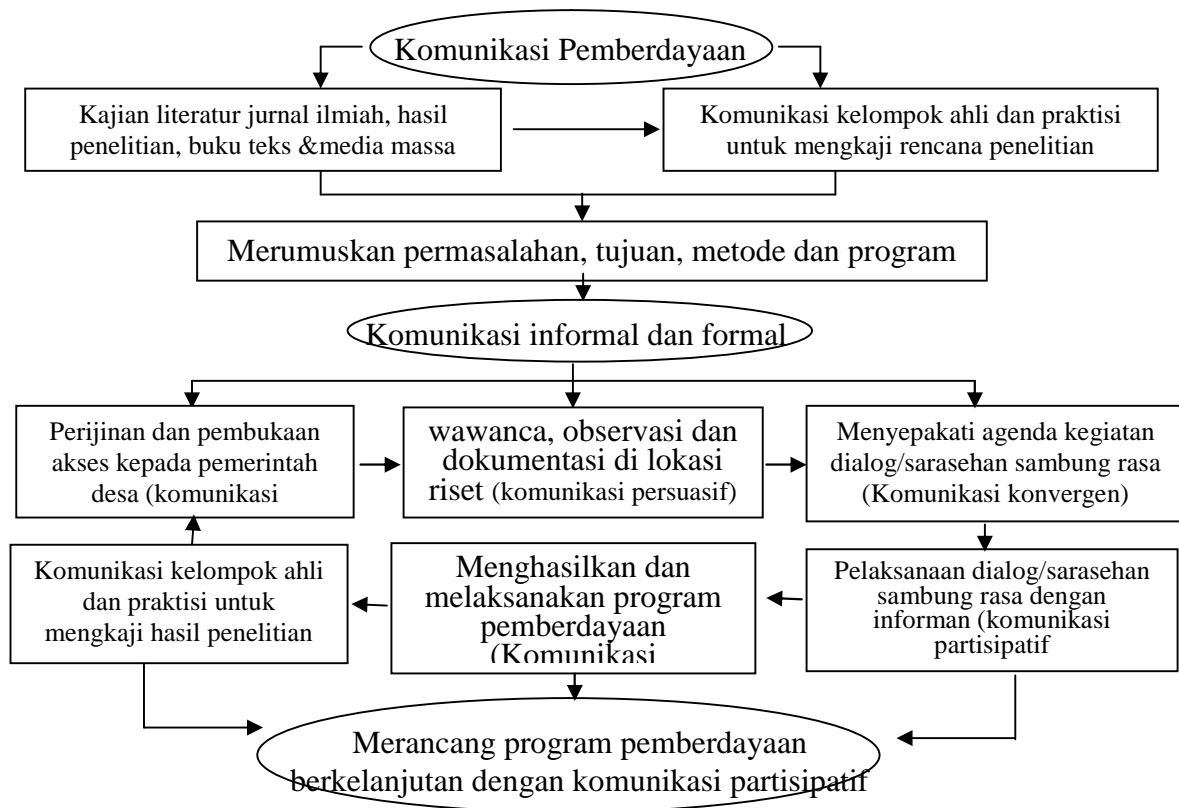
program pemberdayaan masyarakat dapat mengakomodir keberagaman sumber daya ekonomi, sosial, agama dan budaya serta gender. Menurut Satriani (2011) komunikasi partisipatif memiliki dampak pada setiap kegiatan masyarakat yang bermanfaat untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan menyelesaikan masalah secara bersama serta terjalinnya keakraban sesama.

Proses penelitian tersebut menggunakan komunikasi persuasif secara informal dengan menjaga etika komunikasi yang sopan, menjaga etika dan penekanan pada kebutuhan peneliti untuk banyak belajar banyak dari pengalaman para mantan dan calon TKW, bukan mau melakukan penelitian sehingga alasan permohonan ijin secara formal melalui surat resmi dibuat dengan keterangan pengabdian masyarakat. Respons informan akan cenderung tertutup dan menolak jika alasannya penelitian yang terkesan akan mengungkap kejelekan dan masalah, sehingga pengajuan pengabdian masyarakat lebih dapat diterima dan bersahabat. Peneliti mendapat ijin dan dukungan dari pihak pemerintah desa untuk melanjutkan penelitian, supaya bisa menghasilkan program kongkrit yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pemecahan masalah dan pengembangan potensi. Sebagaimana menurut Effendy (2005) komunikasi informal dalam proses interaksi sosial dapat mempunyai kekuatan dan pengaruh terhadap wewenang dan kebijaksanaan yang dikeluarkan secara formal. Hasil penelitian dari Sulaiman (2013) menjelaskan bahwa dalam proses pemberdayaan komunikasi yang bersifat informal tidak bisa dipisahkan dari komunikasi formal. Tahapannya komunikasi formal dilakukan setelah pembukaan akses dengan komunikasi informal terlebih dahulu melalui jalur pertemanan, kolega dan kekeluargaan dari informan kunci kepada informan kunci lainnya. Komunikasi formal melalui surat resmi akan lebih memperkuat pemberdayaan. Jika komunikasi informal gagal, maka terjadi penolakan dari subjek penelitian. Dalam pemberdayaan khususnya pada proses pembukaan akses, selain komunikasi informal juga dengan komunikasi persuasif, sebagaimana DeVito (2011) menyatakan komunikasi persuasif dilakukan dengan memperkuat, memberikan gambaran atau contoh, dan informasi untuk mengubah dan menguatkan sikap serta perilaku dengan menggunakan fakta, opini, dan aspirasi yang memotivasi.

Tahap penelitian berikutnya tahun 2016-2017, setelah mendapatkan ijin dan dukungan pihak pemerintah desa untuk melanjutkan kegiatan, peneliti melakukan dialog dengan para mantan dan calon TKI di desa yang masih berada dalam kelembagaan pemberdayaan perempuan seperti lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

artinya belum memiliki kelembagaan lainnya dibidang wirausaha ekonomi. Kemudian menyepakati dialog bersama di baledesa untuk kegiatan sarasehan atau sambung rasa sebagai pengganti kegiatan pengumpulan data yaitu *Focus Froup Discussion* (FGD). Mengkomunikasikan bentuk kegiatan berupa sarasehan sambung rasa lebih dapat diterima dengan baik, tidak terkesan formal dan lebih nyaman masyarakat untuk mengikutinya dalam hal ini informan perempuan. Mengkomunikasikan agenda kegiatan dialog sarasehan sambung rasa sebagai forum untuk mengeluarkan aspirasi, membuat solusi dan menyepakati program yang akan dilakukan bersama berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan dan potensi masyarakat. Kemudian menyepakati kegiatan baik dari segi waktu dan tempat ditentukan oleh para informan dengan difasilitasi oleh peneliti, supaya tidak membebani para informan baik dari segi akomodasi, konsumsi dan perlengkapan media yang dibutuhkan dalam acara dialog. Kesepakatan melaksanakan kegiatan merupakan proses komunikasi interaksional, menurut Fisher *et al.* (1994) komunikasi interaksional terjadi antara pelaku komunikasi yang membangun potensi subjek berdasarkan hubungan sosial dengan *role-takingwith other* atau memerankan orang lain. Kemudian proses komunikasi selanjutnya menuju pada komunikasi transaksional, West dan Turner (2008) menjelaskan bahwa komunikasi model transaksional prosesnya bersifat kooperatif diantara pelaku komunikasi memiliki konsekwensi terhadap komunikasi efektif serta aktif membangun kesamaan makna atau pemahaman secara terus menerus menerima dan mengirim pesan verbal dan nonverbal. Para pelaku komunikasi menegosiasikan makna, mengintegrasikan pengalaman dan membangun persamaan makna.

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat dirancang suatu model komunikasi pemberdayaan dalam proses dan hasil penelitian yang dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Komunikasi dalam proses penelitian

SIMPULAN

Profesi menjadi tenaga kerja di luar negerimasih menjadi orientasi masyarakat desa yang menilai akan dapat merubah nasib yang lebih baik dan lebih cepat meningkatkan mensejahterakan baik untuk dirinyamaupun keluarganya. Namun tetap saja pada realitasnya menunjukkan problematika yang terus munculmulai dari tahapan administrasi, berangkat, bekerja dan pulang bekerja ke daerah asalnya.

Masih terdapat oknum yang memiliki orientasi keuntungan sesaat untuk menjadikan masyarakat desa khususnya perempuan menjadi TKW ke luar kota dan luar negeri, tanpa mempertimbangkan keahlian, pendidikan dan legalitas serta jaminan keselamatan menjadi pekerja.

Masyarakat dan pemerintah Desa Sidaurip dan Desa Danasri belum terjalin komunikasi partisipatif dalam proses pembangunan, indikasinya yaitu kurang adanya kesempatan secara terbuka untuk beraspirasi dan partisipasi dalam merencanakan, melaksanakan serta evaluasi pembangunan, termasuk dalam program pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat belum dirumuskan dalam perencanaan program pembangunan di desa dan masih bersifat top down karena inisiatif kegiatan dengan anggarannya berasal dari dinas pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, bukan dari aspirasi masyarakat dan pemerintah desa yang bersifat partisipatif (bottom up).

Pemerintah desa tidak memiliki inisiatif untuk membuat rencana program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat, lingkungan, ekonomi dan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dampaknya masyarakat dan pemerintah Desa Sidaurip serta Desa Karangtawang masih menilai profesi menjadi buruh migran adalah solusi paling menjanjikan atau prospektif untuk mengurangi penangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat mantan dan calon buruh migran memiliki potensi melakukan usaha pertanian, perkebunan, peternakan kambing, sapi dan perikanan, namun masih bersifat individual dan kelompok kecil, belum memiliki kesadaran membentuk kelompok usaha bersama untuk mengembangkan dan memperkuat kelembagaan serta memiliki kekuatan mengusulkan program pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan kepada pemerintah desa. Desa dan Masyarakat khususnya kaum perempuan sebetulnya memiliki motivasi yang tinggi dan potensi seluruh sumber daya yang dapat dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan. Pihak pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi agen pemberdayaan yang serius menciptakan lapangan kerja dan mendukung tumbuhnya usaha ekonomi di desa sehingga dapat mengantisipasi masyarakatnya untuk meninggalkan desanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atas program riset Unggulan Unsoed dan Pemerintah Desa Sidaurip, Desa Danasri Kabupaten Cilacap, mantan dan calon buruh migran sebagai informan atas keterbukaan dan kerjasama dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I.R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta

- Bungin, H.M.B., 2008. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana. Jakarta
- Chambers, R. 1983. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta PL3ES
- Dasgupta, S. 2009. Sonarghachi Project : A Case Study Set in India. McPhail T.L (ed). *Development Communication*. Willy-Blackwell. United Kingdom
- DeVito, J. 2011. *Komunikasi Antarmanusia*. Tangerang Selatan: Karisma
- Effendy, O.U. 2005. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung : Rosdakarya
- Eligio, E.M.JE. 2011. Communication imperatives for indigenous peoples' representation in policy making: Lessons from the IPRA (*Indigenous Peoples Rights Act*) experience. *Telematics and Informatics*. 29 (3):324-334
- Fisher, B., Aubrey,. & Katherine, L.A. 1994. *Interpersonal Communication: Pragmatics of Human Communication*. New York: McGraw-Hill
- Hubeis, A.V. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Ife, J., & Tesoriero. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Manullang S, Yakin N, Nursyahid M, penerjemah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Judul asli *Community Development : Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*
- Kim, D.W. 2012. Hearing the Unsung Voice: Women in the Qumran Community. *International Journal of Humanities and Social Science*. 2(19): 275-282
- Mardikanto, T.,& Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat : dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Mikkelsen, B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan* Penerjemah : Matheos Nalle. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Miles, M.B., & Huberman A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Rohidi TR, penerjemah. Jakarta : UI Press
- Muchlis, F. 2009. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Implementasi Musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari) [Tesis]. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Pambudy, R. 2009. Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. *Prosiding Seminar Nasional*. Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat. Kamis, 19 November 2009. IPB International Convention Center (IPB ICC) Bogor: 67-77

- Porras, L.E & Steeves, H.L. 2009. *Feminism in a Post-Development Age* : McPhail, Thomas L, editor. *Development Communication : Reframing The Role of The Media*. Malden, Oxford : Blackwell Publishing Ltd.
- Prihatinah, T.S., Asyik, N., & Kartono, 2012. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(2): 312-320
- Purnaningsih, N. 2009. Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Sosial pada Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. IPB Bogor. 3(3): 379-394
- Rangkuti, P.A. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*. IPB Pers. Bogor
- Robertson, P.J., & Choi, T. 2012. Deliberation, Consensus, and Stakeholder Satisfaction : A simulation of collaborative Governance. *Public Management Review*. 14(1): 83-103
- Satriani, I. 2011. Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor) [Tesis] Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Suadnya, I.W. 2011. Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita. *Agroteksos*. (21)1: 62-70
- Subianto, A. 2006. Pengaruh Pemanfaatan Remitan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu). [Tesis]. Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sulaiman, A.I. 2013. Model Komunikasi Formal Dan Informal Dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 16(2): 173-168
- _____, Lubis, D.P., Susanto, J., & Purnaningsih, N. 2015. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar*. 3(2): 367-378
- Sutaat., Setiti, S.G., Widodo, N., & Unayah, N. 2011. *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal*. Nitimihardjo C, editor. P3KS Press. Jakarta
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwara. Jakarta
- West, R., & Turner, L.H. 2008. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York (US): McGraw-Hill

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII"14-15 November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

Wulan, T.R. 2010. Pengetahuan dan Kekuasaan : Penguatan Remitan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan. [Disertasi]. Pascasarjana IPB

Sumber lain:

[BNP2TKI]. "2.949 Pengaduan Kasus TKI di Proses NTP2TKI". [internet]. [diunduh 29 September 2017]. Tersedia pada : <http://www.bnp2tki.go.id>

[detiknews]. "Sepanjang 2017, Ada 148.285 TKI Ditempatkan di Luar Negeri". [internet]. [diunduh 27 September 2017]. Tersedia pada : <https://news.detik.com>

[Migrant CARE]. "Memperingati Hari Kartini: Kartini Masa Kini Adalah Pekerja Migran". [internet]. [diunduh 21 April 2018]. Tersedia pada : <http://www.migrantcare.net>

[Polhukam]. DPRD Cilacap Fokus Bahas Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW). [internet]. [diunduh 18 Pebruari 2018]. Tersedia pada : <http://polhukam.rmol.co/read>

[Tifa Foundation]. Penutupan Program Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Daerah Asal. [internet]. [diunduh 9 Pebruari 2018]. Tersedia pada : <http://www.tifafoundation.org>